

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Salah satu wilayahnya merupakan wilayah perbatasan. Dalam hal ini, BPS mempunyai tugas untuk melakukan sensus ke setiap daerah yang menjadi wilayah kerjanya termasuk daerah perbatasan. Hal itu, pasti menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sebagai lembaga pemerintah yang mendapatkan kucuran dana dari keuangan negara, sudah seharusnya BPS membuat anggaran yang efektif dan efisien. Setiap anggaran yang dibuatnya akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Salah satu komponen laporan keuangan yang dipublikasikan adalah laporan realisasi anggaran (LRA). Laporan tersebut akan menyediakan informasi anggaran setiap pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan serta menunjukkan nilai realisasi anggaran yang dilakukan berserta presentase realisasi bila dibandingkan dengan nilai anggarannya.

Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang banyak diperhatikan oleh publik, karena masyarakat merasa bahwa salah satu sumber dana yang diperoleh pemerintah adalah sumbangsih dari publik melalui pajak. Belanja juga menunjukkan kebijakan dari sebuah instansi, karena menghasilkan pendapatan lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Maka dari itu, karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan serta rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, sehingga perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan bahan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan kedepan.

Badan Pusat Statistik kabupaten mempunyai anggaran untuk menjalankan berbagai kegiatan operasional. Program kerja dan kegiatan yang dilakukan memiliki kerangka kerja dan anggaran yang ditetapkan. Pada setiap akhir periode, BPS akan menyiapkan laporan hasil kinerja dan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Laporan keuangan yang dibuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan data anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut yang terus mengalami ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi anggaran di lapangan. Sedangkan dalam akuntansi sektor publik terutama komponen

belanja, kurang dan lebihnya dalam realisasi dikatakan sebagai masalah. Jika lebih dari anggaran dikatakan inefisiensi dan jika kurang dikatakan tidak efektif. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut selama lima tahun terakhir (2013-2017) ditemukan selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasinya, berikut disajikan tabel:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja
BPS Kabupaten Garut
Per 31 Desember Tahun 2013 s.d 2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi Di atas (Dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
2013	Rp 14,370,886,000	Rp 14,171,348,671	Rp 199,537,329	98.61%
2014	Rp 6,162,208,000	Rp 5,891,862,692	Rp 270,345,308	95.61%
2015	Rp 17,157,159,000	Rp 14,726,364,138	Rp 2,430,794,862	85.83%
2016	Rp 24,265,161,000	Rp 23,264,198,691	Rp 1,000,962,309	95.87%
2017	Rp 10,882,723,000	Rp 10,319,630,451	Rp 563,092,549	94.82%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut (setelah diolah)

Dilihat dari tabel di atas, angka realisasi anggaran belanja di BPS Kabupaten Garut pada tahun 2014 menurun dari 98.61% menjadi 95.61%. penurunan angka ini tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan tahun berikutnya yaitu tahun 2015. Dalam tahun ini, penyerapan anggaran belanja hanya berkisar pada angka 85.83 %. Kemudian, pada tahun 2016 mengalami kenaikan dengan presentase penyerapan anggaran sebesar 95.87%. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya penyerapan itu mengalami penurunan kembali yaitu pada tahun 2017 sebesar 94.82%.

Berdasar kepada uraian masalah di atas, maka peneliti menyatakan bahwa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai kinerja anggaran belanja dalam laporan realisasi anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Adapun hasil dari penelitian tersebut akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “ **Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pusat statistik Kabupaten Garut Tahun 2013-2017**”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dituangkan di atas, maka yang menjadi fokus masalah penelitian yaitu berkenaan dengan anggaran belanja pada Badan Pusat statistik Kabupaten Garut tahun 2013-2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kinerja anggaran belanja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut tahun 2013-2017?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang sudah dipaparkan peneliti sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggaran belanja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut tahun 2013-2017

E. Kegunaan Penelitian

Dalam proses penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai-nilai positif dalam pengembangan ilmu dan

pelaksanaan aktualisasi ilmu dengan proses pelaksanaan kegiatan. Peneliti juga mengharapkan mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai usaha untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai ilmu administrasi publik secara umum, spesifikasinya tentang ilmu administrasi keuangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Memperoleh pengalaman dalam menganalisis laporan keuangan.
- 2) Hasil Penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) Hasil dari penelitian ini juga dijadikan sebagai media pembandingan antara teori dengan realita di lapangan.

b. Bagi Instansi

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, mengenai kualitas dari anggaran Belanja selama periode tahun 2013-2017. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai cerminan dan salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun Rancangan anggaran belanja pada tahun berikutnya.

c. Untuk Peneliti Lain

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti lain untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menganalisis permasalahan Administrasi Publik di Lapangan. Khususnya Laporan keuangan. Kemudian, peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk melakukan penelitian berikutnya secara lebih mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan keuangan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Bachtiar dkk, 2002:28).

Pengertian di atas diperkuat oleh Anggara (2016:11) bahwa keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan maupun institusi lainnya.

Mursyidi (2009:59) mengatakan bahwa untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan suatu entitas dapat dilihat dalam laporan keuangannya selama satu periode atau pada saat tertentu. Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut Mursyidi (2009:59) adalah untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediaan informasi mengenai ketaatan realiasi dengan anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi keutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Realisasi Anggaran (Mursyidi, 2010: 64) adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode tertentu. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode laporan. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Mahmudi (2016:156) menyatakan berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja, antara lain:

1) Analisis Varians Belanja

Analisis Varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besaran varians anggaran dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasinya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu Selisih disukai (*favourable variance*) dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut

favourable variance, sedangkan jika realisasi lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*.

2) Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

3) Analisis Keceragaman Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil. Analisis ini juga terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja berupa:

- a) Analisis Belanja operasi terhadap total belanja dihitung dengan cara membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD.
- b) Analisis belanja operasi terhadap total belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan

mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.

c) Analisis Belanja Modal terhadap Total belanja

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini pemerintah dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.

4) Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian anggaran. Belanja langsung dan tidak langsung biasanya tidak menjadi bagian dari laporan keuangan eksternal, namun informasi tersebut sangat penting bagi manajemen internal.

a. Rasio efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan

dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100%, maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Bagan Kerangka Pemikiran Analisa Kinerja Anggaran Belanja

